

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Proses pembangunan merujuk pada sebuah transformasi yang terlihat melalui pergeseran baik dalam infrastruktur maupun dalam tatanan sosial (Raharjo *et al.*, 2021), sedangkan pertumbuhan secara umum merujuk pada peningkatan atau perkembangan suatu entitas, baik itu individu, masyarakat, maupun ekonomi, yang dapat diukur dari berbagai aspek seperti jumlah, kualitas, dan kapasitas. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan sering kali diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita, yang mencerminkan kemampuan suatu negara atau daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang dapat ditingkatkan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.

Menurut (Syaifullah, 2008) pembangunan mencakup dua kategori, yaitu yang bersifat fisik berupa infrastruktur dan layanan umum dan yang bersifat nonfisik seperti pengembangan keterampilan warga serta usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak sekadar berhubungan dengan peningkatan akses atau kesejahteraan masyarakat, tetapi

juga mencakup manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap upaya pembangunan yang dilakukan (Kurniawati & Eprilianto, 2022). Keuntungan dari program pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat jika ada keterlibatan langsung dari warga yang menerima manfaat program tersebut.

Implementasi pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan keadilan, keberlanjutan, perspektif lingkungan, serta kemandirian, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dalam kemajuan persatuan nasional.

Musyawarah adalah diskusi mengenai suatu isu tertentu yang menekankan pertukaran pendapat dan argumen, dilakukan dengan melibatkan setiap unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Amanulloh, 2015). Musyawarah merupakan sebuah forum untuk perencanaan (program) yang diorganisir oleh aparat desa bekerja sama dengan warga dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa dikenal sebagai Musrenbang adalah sebuah wadah diskusi tahunan yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana kerja desa untuk tahun anggaran mendatang menurut Mustanir dan Rusdi dalam (Ratri, 2021).

Perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta anggota masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa secara

efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan desa (Anastasya Rosang *et al.*, 2023).

Musrenbang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terhadap inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah. Musrenbang berfungsi sebagai wadah suara masyarakat untuk menyampaikan usulan mengenai pembangunan yang relevan di wilayahnya, sehingga memungkinkan solusi terhadap permasalahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ichwanda *et al.*, 2024).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terdiri dari berbagai level atau tingkatan mencakup Musrenbang pada level Desa atau Kelurahan, Musrenbang di level Kecamatan, Musrenbang di level Kabupaten atau Kota, Musrenbang di level Provinsi, serta Musrenbang di level Nasional. Menurut Soemantri (2011) Kepala Desa bertugas untuk membantu dan mengatur perkembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui pertemuan musrenbangdes.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk para *stakeholder* di tingkat desa. Kegiatan ini diatur oleh lembaga pemerintah desa dengan kolaborasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk tahun anggaran yang akan datang, sekaligus menciptakan

pemahaman bersama tentang kebutuhan dan perkembangan desa. Proses ini melibatkan penilaian terhadap potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik yang berasal dari dalam desa maupun dari luar desa (Darin *et al.*, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.

Musrenbangdes merupakan sebuah forum perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif di tingkat desa. Musrenbang Desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan pembangunan yang dianggap prioritas. Kessa (2015) mengatakan bahwa partisipan dalam forum musrenbangdes meliputi: (a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa berperan untuk mendukung pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa; (b) Pemuka agama dan tokoh masyarakat bertindak sebagai pembimbing; (c) Masyarakat setempat, rukun warga, rukun tetangga, kepala desa, serta pihak-pihak lain perlu menjadi bagian dari keanggotaan; (d) Anggota masyarakat berfungsi sebagai bagian dari kelompok.

Tujuan dari musrenbag desa yang dikemukakan Djohani (2008) adalah untuk menentukan urutan penting dari kebutuhan atau masalah serta aktivitas

desa yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKP Desa dengan pemilihan berikut ini: (1) Aktivitas utama yang akan dijalankan oleh desa tersebut dan didanai melalui kontribusi dana dari warga atau desa itu sendiri; (2) Aktivitas utama yang akan dijalankan di desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari sumber pendanaan lain; (3) Masalah utama yang dihadapi oleh desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang kecamatan agar bisa menjadi program pemerintah daerah serta didanai melalui APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi; (4) Menetapkan kelompok perwakilan dari desa yang akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi desa mereka dalam forum Musrenbang di tingkat kecamatan untuk perencanaan program-program pemerintah daerah atau SKPD untuk tahun mendatang datang.

Keberadaan Musrenbang Desa memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan desa (Hasan *et al.*, 2020). Pertama, Forum ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi dan transparansi. Kedua, Musrenbang Desa memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, karena perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya forum ini, pembangunan desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tingkat lokal.

Dampak Musrenbang Desa terhadap pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Fatmawati *et al.*, 2020). Dari sisi ekonomi, Musrenbang Desa membantu mengarahkan investasi pembangunan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur untuk sektor pertanian, serta peningkatan akses pasar untuk produk lokal. Dengan perencanaan yang efektif, desa memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam sektor pendidikan, Musrenbangdes berperan dalam menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas belajar, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, program pendidikan desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu, Musrenbangdes juga berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi dan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan dan pemberdayaan. Selain aspek ekonomi dan pendidikan, Musrenbangdes juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sanitasi, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dengan adanya forum ini, kebijakan pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Musrenbangdes menjadi instrumen

yang sangat penting dalam mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini menciptakan peluang bagi harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dari kurang baik menjadi lebih baik, membina hubungan yang lebih erat antara warga dan pemerintah setempat. Pembangunan dipandang sebagai proses transformasi sosial yang melibatkan partisipasi luas dalam suatu komunitas, yang mengarah pada kemajuan sosial dan material, termasuk peningkatan keadilan, kebebasan, dan kualitas berharga lainnya bagi mayoritas, karena mereka memperoleh kendali yang lebih besar terhadap lingkungannya (Rochajat Harun, 2011).

Desa Kelong merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini mencakup 17 pulau, tetapi hanya ada 3 pulau yang dihuni, dengan total populasi sekitar 2.429 jiwa. Sebagian besar penduduknya berasal dari etnis Tionghoa dan suku Melayu. Desa kelong adalah Ibukota kecamatan Bintan Pesisir, yang memiliki peran strategis dalam administrasi dan pembangunan wilayah. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, Desa Kelong menjadi titik koordinasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Jumlah penduduk di desa ini dominan tinggi dari beberapa desa yang ada di kecamatan Bintan Pesisir. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Bintan Pesisir Berdasarkan Desa pada tahun 2023:

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang Pesisir Berdasarkan Desa Pada Tahun 2023

No	Desa	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kelong	1.262	1.167	2.429 Jiwa
2	Air Gelubi	558	536	1.094 Jiwa
3	Numbing	1.322	1.171	2.493 Jiwa
4	Mapur	525	474	999 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Tahun 2025 (telah diolah kembali)

Desa Kelong jauh dari wilayah administratif provinsi, akses menuju Desa Kelong hanya dapat dilakukan melalui jalur laut. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Berek Motor dengan tujuan Kelong, yang memakan waktu sekitar setengah jam menggunakan transportasi laut. Setibanya di desa, pengunjung akan disambut oleh panorama laut yang indah, hamparan pepohonan *mangrove* yang menghijau, serta deretan rumah-rumah yang tertata rapi di pesisir. Suara ombak dan mesin pompong menjadi ciri khas yang menambah keunikan suasana desa ini.

Masyarakat Desa Kelong sebagian besar menggantungkan hidupnya pada laut, dengan profesi utama sebagai nelayan. Tradisi penangkapan ikan menggunakan kelong, baik kelong cacak maupun kelong apung, masih dipertahankan hingga kini. Kelong cacak adalah metode tradisional yang menancapkan tiang-tiang kayu di dasar laut dekat pantai, sementara kelong apung merupakan inovasi yang muncul pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an, yang dianggap lebih efisien dan ekonomis.

Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat Desa Kelong mendapatkan sarana untuk mengatasi permasalahan

yang berkaitan dengan pembangunan desa mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat penting. Partisipasi ini dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) mencerminkan rasa kepedulian dan keinginan masyarakat untuk berdedikasi serta memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan di daerah tersebut (Adisasmita, 2006).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan agenda tahunan yang krusial dalam menentukan arah pembangunan desa. Melalui forum ini, pemerintah desa bersama masyarakat berdiskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, baik di sektor fisik maupun non-fisik. Berikut tabel jumlah peserta musrenbang Desa Kelong dari tahun 2020-2023:

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Musrenbang Desa Kelong

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Musrenbang Desa Tahun 2020	67	33	100 Orang
2	Musrenbang Desa Tahun 2021	40	21	61 Orang
3	Musrenbang Desa Tahun 2022	21	14	35 Orang
4	Musrenbang Desa Tahun 2023	26	31	57 Orang
5	Musrenbang Desa Tahun 2024	25	31	56 Orang

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 dan 2023 terdapat perubahan menarik dalam partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Jumlah partisipasi terkait daftar hadir peserta musrenbangdes pada tahun 2022 dan 2023 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, padahal jumlah APBDes pada tahun 2023 cukup besar mencakup angka Rp. 3.874.280.871. Penurunan partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya.

Pada Musrenbangdes tahun 2023, yang dilaksanakan pada 23 Januari 2023, masyarakat Desa Kelong mengajukan beberapa usulan prioritas. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan pengumpan lokal yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas bongkar muat barang dan transportasi anak sekolah. Selain itu, usulan lain mencakup rehabilitasi sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Polindes) di Kampung Tenggel, pembangunan pelantar atau tambatan perahu, pembangunan pagar dan atap untuk SMPN 19 Bintan, serta pengadaan kapal penangkapan ikan *fiber* 1 GT. Berikut tabel daftar Usulan musrenbang desa kelong tahun anggaran 2024:

Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang Desa Kelong Tahun 2023 Untuk Anggaran 2024

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
1	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Tokoh Masyarakat

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
		Bongkar Muat)		
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pelantar atau Tambatan Perahu	RT 001 RW 002 s/d RT 010 RW 03 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Masyarakat /RT/RW
3	Dinas Kesehatan	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Polindes (Kampung Tenggel)	RT 010 RW 003 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kader Posyandu
4	Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan <i>Fiber 1</i> GT	RT 001 s/d RT 010 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Nelayan dan Tokoh Masyarakat
5	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar SMP	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Drainase dan Kolam Retensi Area Waduk	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	RW 01
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan Batu Miring SDN 002 Bintan Pesisir	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bantuan Pembangunan Sarana Keolahragaan (Pagar Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Voli)	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Karang Taruna
9	Dinas Perikanan	Kartu Asuransi Nelayan	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan	Kelompok Nelayan
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
		SDN 002 Bintan Pesisir		
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pelantar atau Tambatan Perahu	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Masyarakat
12	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Guru PAUD
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pagar Perkuburan	RT 001 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	RT/RW
14	Dinas Kesehatan	Rehabilitas Bangunan UPTD Puskesmas Kelong Perbaikan Plafon dan Jalur Ambulan UPTD Puskesmas Kelong	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Puskesmas
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintan Pesisir	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Perangkat Kecamatan

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Seluruh usulan tersebut disetujui secara administratif dan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, yang kemudian diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk diproses lebih lanjut oleh instansi terkait.

Namun dalam implementasinya, tidak semua usulan yang telah disetujui tersebut berhasil direalisasikan. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun, diketahui bahwa sebanyak 10 dari 15 usulan telah direalisasikan, sementara 5 usulan lainnya masih belum terealisasi.

Adapun usulan yang belum terealisasi hingga pertengahan tahun anggaran 2024 adalah:

1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan Bongkar Muat)
2. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Polindes (Kampung Tenggel)
3. Pembangunan Pagar SMP
4. Pembangunan Perpustakaan SDN 002 Bintang Pesisir
5. Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintang Pesisir.

Melalui pelaksanaan Musrenbangdes, Desa Kelong berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam forum ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa Kelong merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik unik dalam aspek geografis, sosial, dan ekonomi. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.429 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, masyarakat di desa ini sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, keterbatasan akses transportasi yang hanya mengandalkan jalur

laut menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan desa, terutama dalam hal distribusi barang, mobilitas penduduk, dan akses layanan publik.

Selain itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelong menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif. Musrenbangdes tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan mendesak terhadap pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan pengumpan lokal untuk mendukung transportasi barang dan anak sekolah, rehabilitasi Polindes di Kampung Tenggel, pembangunan pelantar atau tambatan perahu, pembangunan pagar dan atap untuk SMPN 19 Bintan, serta pengadaan kapal penangkapan ikan *fiber* 1 GT. Dengan adanya forum ini, perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Kelong dalam pelaksanaan musrenbang masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk dana, program, maupun ide. Sebagian besar masyarakat cenderung pasif dan hanya sedikit yang memberikan tanggapan atau masukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan suatu penelitian yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dipaparkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan musrenbang terhadap peningkatan pembangunan di Desa Kelong Kabupaten Bintan pada tahun 2024?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan musrenbang terhadap peningkatan pembangunan di Desa Kelong Kabupaten Bintan pada tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 bagian manfaat penelitian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan musrenbang desa terhadap peningkatan pembangunan di desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil dan masukan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan musrenbang kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai rekomendasi untuk masyarakat desa Kelong saat melaksanakan musrenbang kedepannya.

